

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Renaldi Hanison Baiyo & Xaveria Indri Prasasyaningsih

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Email: indriprass@staff.ukdw.ac.id

Abstract

This study aims to identify and analyze whether Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) have an impact on poverty levels in East Nusa Tenggara Province. The research utilizes secondary data, meaning the information was collected by other parties for specific purposes and classified according to their needs. The processed secondary data were obtained from official sources such as the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Central Bureau of Statistics, and other government-related literature. The data comprises a panel dataset that includes cross-sectional data, with the sample consisting of financial data from the regency/municipality governments in East Nusa Tenggara Province, including DAU, DAK, DBH, and poverty levels over a five-year period from 2018 to 2024. With a total of 22 regencies/municipalities, the dataset analyzed includes 110 observations. The results of the analysis indicate that PAD, DAU, and DAK have a significant influence on poverty levels in East Nusa Tenggara Province, whereas DBH does not show a significant effect on poverty in the region.

Keywords East Nusa Tenggara Province, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), poverty.

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezagia, 2018). Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2019), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan banyak terjadi di berbagai daerah atau Provinsi di Indonesia, salah satu Provinsi yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT, terletak di timur kepulauan Nusa Tenggara dengan ibu kota di Kota Kupang, dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. Berdasarkan data BPS 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di peringkat ke-4 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 19,02% di Indonesia, setelah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat, dengan presentase sebesar 19,48%.

Berdasarkan rata-rata Tingkat Kemiskinan di NTT (Nusa Tenggara Timur) tahun 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 19,96% hal ini tergolong sangat tinggi jika dilihat dari rata-rata tingkat kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia tertinggi adalah 20%. Mengapa hal ini sangat tinggi, bisa dilihat dari transparansi pengelolaan APBD efektivitas penggunaan DAU, DAK yang belum tepat sasaran sehingga tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan penggunaan dana alokasi anggaran yang buruk menimbulkan masalah kegagalan dalam mencapai tujuan keuangan, efisiensi pengeluaran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, penurunan kualitas layanan publik dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Kartika, D., & Kusuma, I. C., 2015).

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kemiskinan di NTT, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam hal ini perlu adanya identifikasi beberapa aspek, termasuk perbedaan geografis, jumlah populasi, perbedaan sejarah, kekayaan sumber daya alam, peran sektor swasta dan pemerintah, struktur industri, serta hubungan ekonomi dan politik dengan negara lain (Wijaya, 2020). Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan bencana alam seperti kekeringan, tingginya pengangguran, kondisi alam yang tandus dan gersang yang menyebabkan krisis pangan dan kekeringan, kesenjangan pendidikan, kurangnya akses fasilitas kesehatan yang memadai, dan kurangnya investasi di sektor-sektor yang berpotensi mensejahterakan rakyat dan daerah. Indonesia harus lebih memperketat lagi tentang pendanaan keuangan ke daerah-daerah dan harus dipastikan digunakan sesuai kebutuhan dari provinsi/daerah tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan kondisi daerah.

Pentingnya dana perimbangan adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan umum di seluruh negeri. Implementasi dana perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Peranan dana perimbangan dalam pelaksanaan desentralisasi menuntut sebuah daerah untuk menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang daerah. Selain bantuan dari pemerintah pusat yaitu melalui dana perimbangan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tolok ukur daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

2. Tinjauan Literatur

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 20 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen sendiri dana perimbangan adalah, DAU, DAK serta DBH. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1, menyatakan bahwa, pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk Dana Alokasi Umum, dana ini ialah integral dari dana perimbangan serta sumbernya daripada APBN. Dalam Pasal 1 ayat 71 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) mengatur berbagai aspek keuangan daerah, termasuk Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dipakai guna memberikan dukungan pemerintah daerahnya pada tataran untuk melaksanakan desentralisasi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pengalokasian dana dan penggunaan DAK, dana ini ialah integral dari dana perimbangan serta sumbernya daripada APBN. Dalam Pasal 1 ayat 72 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) DAK yakni alokasi dana yang dilakukan pemberiannya dari sisi pemerintah pusat terhadap daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publiknya yang bersifat strategis pada beragam lokasi di Indonesia. Pendistribusian dana ini yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengurangi disparitas antar wilayah dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Dana Bagi Hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 70 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH juga digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dan menyeimbangkan fiskal antara pusat dan daerah.

Teori Kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Menurut Ridzky (2018), menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pengangguran, dampak dari pengangguran tinggi menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan terus meningkat. Menurut Kuncoro (2013) Kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang ketiga jenis kemiskinan tersebut: (1) Kemiskinan Absolut: Seseorang termasuk golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk menjamin kelangsungan hidup. (2) Kemiskinan Relatif: Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila rumah tangga tersebut memiliki pendapatan atau pengeluaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup rata-rata masyarakat sekitarnya. Garis kemiskinan relatif dinamis dan berubah seiring dengan perubahan standar hidup masyarakat. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. (3) Kemiskinan Kultural: Seseorang termasuk golongan kemiskinan kultural apabila orang atau sekelompok masyarakat tersebut mempunyai sikap atau perilaku budaya yang menghambat peningkatan taraf hidup, meskipun ada kesempatan dan peluang untuk berubah. Contohnya, adanya kebiasaan tidak mau bekerja keras atau tidak memanfaatkan peluang yang ada.

Guna memahami bagaimana variabel-variabel dalam penelitian ini saling mempengaruhi, berikut disajikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antar

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



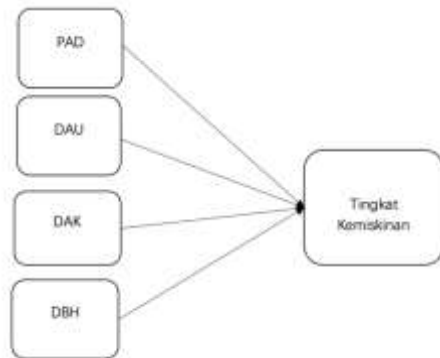
e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

variabel tersebut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi krusial pada pertumbuhan suatu wilayah dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. PAD yang tinggi menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah pada tataran mengumpulkan sumber pendapatannya, yang bisa dipakai guna melakukan pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan usaha daerah. Investasi ini memperlihatkan bahwasanya peran PAD bisa memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing daerah yang berdampak pada pengurangan kemiskinan (Setiyawati, 2007). Dengan demikian peningkatan PAD dapat mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan uraian yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{01} :Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

H_{a1} :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) ialah transfer pemerintah pusatnya ke daerahnya yang bermaksud guna membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Penyaluran DAU yang tepat sasaran oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya dana ini, dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung dan memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiaya berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya dan dapat mengurangi kemiskinan pada daerah tersebut,

H_{02} :Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

H_{a2} :Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendapatan daerah yang diberikan dari pemerintah pusatnya guna pembiayaan proyek atau program tertentu. Dana Alokasi Khusus berperan penting dalam

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

membantu pemerintah daerah untuk menjalankan proyek – proyek strategis seperti, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan publik serta memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu DAK memiliki peran penting dalam mengurangi peningkatan kemiskinan dengan memberikan dukungan keuangan khusus dan terarah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

H₀₃ :Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

H_{a3} :Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH itu sendiri dialokasikan kepada daerah penghasil, daerah pengolah, daerah perbatasan langsung, dan daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi. DBH juga berperan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan fiskal, eksternalitas dan membantu daerah dalam mengatasi berbagai persoalan.

H₀₄ :Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

H_{a4} :Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis kuantitatif. Data dari Variabel (y) adalah Tingkat Kemiskinan di ambil dari bps Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (<https://www.bps.go.id/id>), dan data berikut adalah variabel (x) yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH yang diperoleh dari *website* (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>), Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/id>), serta sumber kepustakaan lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 22, periode pengamatan selama lima tahun yaitu dari tahun 2018-2022 sehingga total data yang diobservasi sebanyak 110. Data yang dihimpun di penelitian ini akan diolah memakai perangkat lunak *Eviews* 13 untuk merumuskan dan mengembangkan model regresi yang tepat, sebagai alat prediksi yang akurat serta bebas dari bias.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan uji hipotesis guna mengevaluasi signifikan koefisien regresi yang diperoleh. Dalam pengujian ini, ada tiga ragam hipotesis yang dilakukan untuk penelitian: pengujian koefisien determinasi, pengujian f (pengujian simultan), serta pengujian t (pengujian parsial).

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Tabel 1. Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12378.95	9152.337	-1.352545	0.1791
PAD	-0.000000125	7.17E-08	-1.744486	0.0840
DAU	0.000000109	1.90E-08	5.749141	0.0000
DAK	0.0000000585	1.71E-08	3.421740	0.0009
DBH	0.000000668	6.22E-07	1.075055	0.2848

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.001955	0.0000
Idiosyncratic random		22505.65	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.369763	Mean dependent var	52321.10
Adjusted R-squared	0.345523	S.D. dependent var	27535.98
S.E. of regression	22276.54	Sum squared resid	5.16E+10
F-statistic	15.25432	Durbin-Watson stat	1.877364
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.369763	Mean dependent var	52321.10
Sum squared resid	5.16E+10	Durbin-Watson stat	1.877364

Berdasarkan data tabel diatas, maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD dengan nilai coefficient sebesar -0,000000125 serta nilai probabilitasnya 0.0840 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkatan keyakinan 0.1 atau $< 10\%$ sehingga H_1 diterima, H_0 ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah/PAD memiliki signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
- 2) Variabel DAU nilai coefficient sebesar 0,000000109 serta nilai probabilitasnya 0,0000 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 atau $< 5\%$ sehingga H_1 diterima, H_0 ditolak artinya Dana Alokasi Umum/DAU memiliki signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
- 3) Variabel DAK nilai coefficient sebesar 0,0000000585 serta nilai probabilitasnya 0,0009 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau $< 5\%$ sehingga H_1 diterima, H_0 ditolak artinya Dana Alokasi Khusus/DAK memiliki signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

- 4) Variabel DBH nilai coefficient sebesar 0,000000668 serta nilai probabilitasnya 0,2848 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan 0,05 atau $>5\%$ sehingga H_1 ditolak, H_0 diterima artinya Dana Bagi Hasil/DBH tidak memiliki signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
- 5) Pengujian signifikansi simultan (Uji F), terlihat bahwa nilai probabilitasnya dari F-statistik ialah 0.000000, yang artinya nilai probabilitasnya kurang dari 0.05. Atas dasar tersebut, bisa diberikan kesimpulan bahwa secara kolektif, semua variabelnya, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), mempunyai signifikansi determinasi atas variabel dependennya, yakni Tingkat Kemiskinan (TK).
- 6) Nilai Adjusted R-squared atau koefisien determinasinya (R^2) yakni 0.369763. Dengan demikian, 37% keragaman dari variabel dependennya yakni Tingkat Kemiskinan bisa dijabarkan oleh variabel independennya PAD, DAU, DAK, DBH, sedangkan 63% sisanya dijabarkan diluar modelnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan hasil coefficient sebesar -0,000000125 serta probabilitas 0.0840. Hasil ini kurang dari ambang signifikan 0.1. yang berarti hipotesis diterima. Koefisien PAD bertanda negative dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, artinya jika PAD naik maka Tingkat Kemiskinan akan turun dan sebaliknya, jika PAD turun maka Tingkat Kemiskinan akan naik. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, semakin kecil pula tingkat kemiskinan di daerah tersebut dan sebaliknya. Penggunaan PAD ini untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program pembangunan. Tujuan dan fungsi dana ini adalah, memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan independen untuk melaksanakan tugas otonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. PAD juga digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, infrastruktur, ekonomi, maupun sosial, dengan adanya PAD pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat (APBN). Pengelolaan PAD yang kurang memadai, permasalahan penggunaan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masi banyak terjadi dan mempunyai permasalahan yang sama, seperti pada kabupaten-kabupaten barikut: kabupaten Sikka, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, potensi pajak dan pariwisata belum digunakan secara maksimal meskipun wilayah tersebut akan mulai digitalisasi pemungutan PAD-nya, tetapi kontribusinya masih rendah. Kapasitas aset daerah masi lemah dan dalam pengelolaan aset tidak produktif, yang padahal bisa jadi sumber PAD. Meskipun meningkat, ritribusi daerah belum mencapai target mereka, hal tersebut masih jauh lebih kecil dari pajak daerah. Di Kabupaten lain seperti Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba, Alor, Malaka, dan Kota Kupang, basis pajaknya masi sempit dominasi sektor primernya pada pertanian dan perikanan, sedangkan sektor formalnya kecil, pajak dan retribusinya rendah. Sumber Daya Manusia SDM dan tata kelola kurang memadai, monitoring serta evaluasi belanja daerah kurang optimal serta Pendapatan Asli Daerah terkesan digunakan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

untuk belanja rutin, bukan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengelolaan sumber PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal sehingga daerah masi mengalami kemiskinan yang cukup parah, maka perlu adanya perubahan untuk meningkatkan dana Pendapatan Asli Daerah, karena semakin besar PAD semakin besar pula pengalokasian belanja pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator mengurangi tingkat kemiskinan, di mana masyarakat yang sejahtera mencerminkan daerah yang maju. Dengan demikian semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dan dialokasikan secara tepat oleh pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan hasil koefisien 0,000000109 serta probabilitas sebesar 0.0000. Hasil ini kurang dari ambang signifikan 0.05, yang berarti hipotesis di terima. Dapat disimpulkan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tepat sasaran, pemerintah daerah tersebut sudah menggunakan dana sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki penghasilan daerahnya sendiri yang di kenal dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, dan pantai-pantai yang eksotis, serta beberapa komoditas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi unggulan dan diekspor, seperti kedelai, rumput laut, dan *Day Old Chick broiler* atau anak ayam broiler. Hal ini bisa menjadi pendapatan bagi NTT untuk menambah pembiayaan dalam membangun daerahnya dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat seperti dana APBN. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 ayat 71). Karena ketidaksetaraan dalam sumber daya yang ada di semua wilayah, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan moneter dan keuangan di antara administrasi lokal. Penggunaan Dana Alokasi Umum itu sendiri, untuk membiayai kebutuhan daerah, seperti gaji pegawai, belanja modal, dan biaya operasional pemerintahan. DAU menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan desentralisasi, yaitu transfer kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi pendanaan DAU memungkinkan sebuah daerah lebih sejahtera dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan hasil koefisien 0,0000000585 serta probabilitas sebesar 0.0009. Hasil ini kurang dari ambang signifikan 0.05, yang berarti hipotesis diterima. DAK berdampak pada penurunan Tingkat Kemiskinan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat seperti pendanaan DAK dapat membantu dalam membangun daerah tersebut, karena Dana Alokasi Khusus adalah, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membantu dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti: mendukung pembangunan, dan pengadaan sarana dan prasarana fisik layanan publik daerah, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus cenderung untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus yang bersifat jangka panjang, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Santosa, 2013). Dana alokasi khusus berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi yang konsisten dengan karakteristik dan kemungkinan ekonomi lokal. Pendanaan alokasi khusus harus bertujuan untuk menyediakan pendidikan, dan meningkatkan infrastruktur daerah. Dana Alokasi Khusus yang diberikan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah digunakan dengan tepat. Sehingga dana tersebut berperan penting dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan hasil *koefficient* 0,000000668 serta probabilitasnya sebesar 0.2848. Hasil ini lebih dari ambang signifikan 0.05, yang berarti hipotesis ditolak. Artinya, apabila Dana Bagi Hasil meningkat maka hal tersebut menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dan menurunkan kemiskinan dan juga sebaliknya. Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA). Dana Bagi Hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta bagian daerah Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan Dana Bagi Hasil SDA meliputi minyak bumi dan gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 dengan total realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp 46,08 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 22,28 persen dari total alokasi DBH Nusa Tenggara Timur tahun ini yang mencapai Rp 206,84 miliar. (id, 2025). Dana ini disediakan untuk mendukung pemerintah dan layanan publik di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembagian Dana Bagi Hasil ini dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar) serta berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (*Based on Actual Revenue*). Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42), banyak negara menggunakan sistem partisipasi laba pajak dengan distribusi proporsi pajak permanen nasional tertentu, seperti pajak penghasilan dan pajak nilai, kepada pemerintah daerah (Joula et al., 2019).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018–2022, penelitian ini menyimpulkan: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan PAD sebesar Rp1 miliar mengurangi kemiskinan sebesar 0,125 jiwa, mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi lokal efektif menurunkan kemiskinan. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan DAU Rp1 miliar meningkatkan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

kemiskinan sebesar 0,109 jiwa. Hal ini menandakan alokasi DAU di NTT belum tepat sasaran, cenderung digunakan untuk belanja rutin (misal: gaji pegawai) bukan program produktif pengentasan kemiskinan. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Kenaikan DAK Rp1 miliar meningkatkan kemiskinan sebesar 0,0585 jiwa. Implikasi ini menunjukkan proyek strategis berbasis DAK (infrastruktur, pertanian, pariwisata) belum berdampak maksimal pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin. (4) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. DBH yang bersumber dari bagi hasil SDA dan pajak nasional belum mampu mengurangi ketimpangan fiskal di NTT karena minimnya kontribusi sektor SDA lokal terhadap pendapatan daerah. (5) Secara simultan, seluruh variabel fiskal (PAD, DAU, DAK) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan tetapi tidak dengan DBH (Nilai F -statistic = 15,254; p -value = 0,0000), meskipun variabel non-fiskal (geografis, iklim, SDM) mendominasi 63% dinamika kemiskinan di luar model.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah: (1) Peningkatan Efektivitas PAD: (a) Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi lokal (pertanian, pariwisata, perikanan) melalui digitalisasi pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan aset daerah yang produktif. (b) Alokasi PAD harus diprioritaskan untuk program padat karya dan pemberdayaan UMKM guna menciptakan lapangan kerja. (2) Reformasi Alokasi DAU dan DAK: (a) DAU harus dialihkan dari belanja rutin ke belanja modal produktif (infrastruktur dasar, irigasi, teknologi pertanian) yang mendukung sektor unggulan NTT. (b) DAK perlu difokuskan pada proyek strategis berbasis kebutuhan spesifik daerah (misal: embung untuk atasi kekeringan, sekolah, dan lapang pertanian) dengan pengawasan ketat terhadap implementasinya. (3) Revitalisasi Peran DBH: Pemerintah pusat wajib memastikan DBH diarahkan ke pengembangan SDA lokal (kehutanan, perikanan) dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keterampilan. (4) Kebijakan Holistik Non-Fiskal: Membangun kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, lingkungan) untuk mengatasi akar kemiskinan multidimensi di NTT, seperti: Program adaptasi iklim untuk petani, Penyediaan akses pendidikan dan kesehatan terjangkau, Penguatan bantuan sosial (bansos) berbasis data kemiskinan real-time. (5) Riset Lanjutan: (a) Memperluas periode studi dan menambah variabel non-fiskal (infrastruktur, indeks pendidikan, akses kesehatan). (b) Studi kualitatif untuk mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan fiskal di tingkat kabupaten/kota.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Ringkasan data dan informasi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024*. Nusa Tenggara Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009–2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.23686> (DOI added if available — verify on journal)

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

site)

Joula, K., Rasu, E., Kumenaung, A. G., & Koleanan, R. A. M. (2019). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(4).

Santosa, B. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah terhadap pertumbuhan, pengangguran dan kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).

Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: Pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 5–26.

Wijaya, H. I. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan (Studi kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 451–455.

Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–34.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)